

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gima Sugiama. (2013). *Metode Riset Bisnis dan Manajemen*. Edisi Pertama, Bandung: Guardaya Intimarta
- Abas, Ira Waty. (2013). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo). *Jurnal ilmiah*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Aljufri Bokingo, Muslimin, dan Nina Yusnita. (2017). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penatausahaan, Pengawasan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Buol). *Jurnal Katalogis, Vol. 5 No. 12, Desember 2017 hlm 43 - 54. ISSN:2302-2019* , 43 - 54.
- Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia, Perwakilan BPK-RI. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Untuk Tahun Anggaran 2018*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2018). *Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Barang Milik Daerah*.
- Fadillah, N. (2018). Pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah kabupaten Bandung Barat.). *Skripsi Program Studi D4 Akuntansi manajemen Pemerintahan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung 2018.*) .
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Spss*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Gubernur Sumatera Selatan. *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan*.
- Imbiri, Jefri. (2018). Pengaruh inventarisasi, pembukuan dan pelaporan Aset terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Waropen). *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset Vol.1 No2, November 2018 : 34 - 62* , 34 - 62.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah NO. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah*.

- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Perubahan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.*
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2014). *Buletin Teknis Nomor 15 Tentang Akuntansi Aset Tetap berbasis Akrua.*
- Priyatno, Duwi. (2012). *Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan SPSS 20.* Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Penerbit Andi Yogyakarta
- Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Vanindya, D. A. (2018). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi Program Studi Akuntansi Sektor Publik D4, Jurusan Akuntansi , Politeknik Negeri Sriwijaya.*
- Yulpi Poae, V. I. (2016). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Talaud. *Tesis, Program studi magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi , 159 - 169.*